

**PENGARUH KUALITAS PENGENDALIAN INTERN
TERHADAP PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMUM PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH
SMP/SMA DI KOTA**

Oleh :

**ANDI DEFRIYAN
BP. 08206086**

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Akuntansi Pemerintahan pada Program Pascasarjana Universitas
Andalas**



**PROGRAM PASACASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan adalah faktor penting untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Kenyataannya, tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan karena mahalnya biaya yang dikeluarkan. Kondisi inilah kemudian mendorong dimasukkannya usulan tentang pendidikan dalam amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Konstitusi mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan biaya pendidikan 20% dari Anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) maupun Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) agar masyarakat dapat menikmati pelayanan pendidikan.

Membangun sebuah pendidikan yang bermutu dan berkualitas membutuhkan waktu yang cukup lama dan memakan banyak biaya, namun semua itu akan terbayar jika pendidikan tersebut melahirkan generasi sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai produktivitas yang tinggi, sehingga dapat mengalokasikan semua potensi yang dimilikinya untuk memajukan pembangunan khususnya di bidang pendidikan.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan adanya Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari standar isi, standar proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan pendidikan. Belum adanya pengaturan administratif dalam pengelolaan pendidikan yang belum tertata dengan baik

seperti menyangkut dengan sumber daya manusia yang mengelolanya, Untuk memenuhi itu perlu adanya *suatu sistem pengawasan*

Sistem pengawasan adalah suatu proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Sondang P.Siagian). Atau sistem pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak (Suyanto)

Sedangkan fungsi umum dari suatu sistem pengawasan adalah :

- Eksplanasi**, pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program yang dicanangkan berbeda.
- Akuntansi**, pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu.
- Pemeriksaan**, pengawasan membantu menentukan apakah sumberdaya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka. dan
- Kepatuhan**, pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator program, staf dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator, instansi pemerintah dan atau lembaga profesional.

Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada sekolah yang dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara

secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Salah satu tipe sistem pengawasan yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara efektif adalah sistem pengawasan intern, yaitu pengawasan yg dilakukan oleh orang dari badan/unit/instansi di dalam lingkungan unit tsb. Yang dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*)

Sistem pengendalian intern ini berperan sebagai :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.
3. Mengetahui penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana awal (*planning*) terarah kepada sarannya dan sesuai dengan yang direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase/tingkat pelaksanaan).
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Pengendalian intern terdiri dari Accounting control dan administratif control . Pengendalian Intern Akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Contoh : adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.

Pengendalian Administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.(dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi) Contoh : pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.

Belum adanya penatausahaan pengelolaan administrasi yang teratur dalam proses penyelenggaraan Pendidikan disekolah menengah SMP/SMA di kota Padang menentukan berbagai langkah-langkah kebijakan untuk pengambilan berbagai keputusan pengelolaan pendidikan perlu adanya pengendalian Intern yang menjadi acuan sekaligus kriteria dalam menetapkan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu administratif control yang merupakan bagian pengendalian intern dalam pengawasan pelaksanaan proses penyelenggaraan pendidikan sangat dibutuhkan, untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Dengan peningkatan kualitas pendidikan adanya pengawasan administratif control tersebut mempunyai pengaruh positif dalam pencapaian standar pelayanan minimum pada bidang Pendidikan sangat diperlukan juga , untuk dapat mengakses kebutuhan masyarakat akan pentingnya pendidikan Pelaksanaan administratif control itu berjalan dengan baik , maka semua stakeholders pendidikan harus dapat bekerjasama bagaimana memberikan suatu pelayanan minimum untuk pendidikan yang berkualitas dalam pengelolaan Pendidikan menengah SMP dan SMA di kota Padang. Sumber daya manusia pengelola pendidikan harus benar-benar memahami, dan meningkatkan kualitas skill/kemampuannya , disiplin bekerja, dan mempunyai tanggung jawab .

Berdasarkan betapa pentingnya administratif control dalam pengelolaan administrasi pendidikan terutama menyangkut aspek manusianya (guru/pegawai) sekolah ,maka perlu pengendalian Intern itu diterapkan disekolah,yang berguna untuk mengawasi segala aktifitas kegiatan dalam mengujudkan ketercapaian Pelayanan Minimum Pendidikan .untuk meningkatkan kinerja Pelayanan Pendidikan

Sedangkan fungsi administratif control adalah sebagai berikut

- 1.Dapat dipercayai sebagai alat analisis untuk peningkatan kualitas pendidikan pada sekolah SMP/SMA
2. Pengawasan dan penelitian yang melihat pada administratif control yang baik mampu melindungi terhadap kelemahan manusia dan mengurangi terhadap kelemahan manusia serta mengurangi kemungkinan kesalahan atau ketidakberesan yang akan terjadi. Pada setiap kegiatan pada lingkungan sekolah tersebut
3. Tidak praktis apabila akuntan untuk memeriksa secara keseluruhan dengan keterlibatan uang tanpa mempercayai administratif control
- 4 Kegiatan administratif control berguna untuk pengambilan langkah-langkah dalam menetapkan keputusan yang essensial terhadap suatu kebijakan yang akan diambil pimpinan sekolah untuk menciptakan suatu kualitas pelayanan Pendidikan yang baik kepada masyarakat
5. Kualitas administratif control pada sekolah dilaksanakan sebagai tolok ukur pengujian efectivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern, dan Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern dengan administratif control untuk mempertimbangkan aspek biaya- manfaat (*cost and benefit*), sumber

daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif.

Dengan adanya permasalahan dalam proses pengelolaan pendidikan seperti yang telah dijelaskan diatas belum adanya penata administratif yang belum sempurna, maka perlu fungsi administratif control diterapkan untuk melakukan pengawasan intern. agar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Dengan pengendalian administratif yang teratur dan baik akan berpengaruh terhadap pencapaian standar pelayanan minimum Pendidikan

Standar pelayanan minimum pendidikan yang merupakan tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah. Seberapa besar tingkat kesesuaian antara pelayanan pendidikan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan standar pelayanan minimum yang harus ada dapat dijadikan indikator untuk mengukur kinerja pendidikan yang pada akhirnya dapat melahirkan program-program pendidikan yang lebih baik

Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang pendidikan yang memuat target tahunan, rencana pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan target tahunan pencapaian SPM dituangkan kedalam Rencana Kerja (Renja) pemerintah daerah, Renja SKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) rencana kerja dan anggaran SKPD sesuai klasifikasi belanja daerah..

Untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan dibutuhkan berbagai komponen penting, antara lain anggaran, sumber daya manusia yang

mengelolainya, sarana dan fasilitas pendukung kebutuhan Pendidikan, kurikulum manajemen pengolahan Pendidikan.

.Penulis dalam hal ini meneliti dari segi bagaimana pengawasan administratif control yang merupakan bagian dari pengendalian intern dalam pencapaian standar pelayanan minimum pendidikan .Oleh karena itu harus dikenal dulu apa itu Intenal control ? . kalau dalam Perusahaan pengertiannya yaitu Suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan..

Menurut (AICPA Profesional Standard) Pengendalian Intern Adalah : menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. yang merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.Terdiri dari :. Integritas dan nilai etika. Komitmen terhadap kompetensi Partisipasi dewan komisaris dan komite audit. Struktur organisas Pemberian wewenang dan tanggungjawab. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Pada instansi pemerintah (sekolah) mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan sesuai dengan PP No.60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian utern , yang meliputi 5 unsur yaitu :

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Penilaian risiko

c. Kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan komunikasi.

e. Pemantauan

Menurut PP No.60 tahun .2008 yaitu Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat. Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan pembimbingan dan konsultasi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menerapkan setiap unsur dari Sistem Pengendalian Intern. Perlu dievaluasi secara berkelanjutan untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berkembang mengikuti perubahan lingkungan. Secara khusus, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah, pimpinan Instansi Pemerintah melakukan pemantauan antara lain melalui evaluasi terpisah atas Sistem Pengendalian Internnya masing- masing untuk mengetahui kinerja dan kualitas Sistem Pengendalian Intern serta cara meningkatkannya. Pemantauan juga berguna untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko utama seperti penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan, dan salah-kelola (*mismanagement*). Daftar uji pengendalian intern pemerintah dimaksudkan untuk membantu pimpinan Instansi pemerintah, evaluator dalam menentukan sampai seberapa jauh pengendalian intern suatu Instansi Pemerintah dirancang dan

berfungsi serta, jika perlu, untuk membantu menentukan apa, bagian mana, dan bagaimana penyempurnaan dilakukan

Menurut Departemen Pendidikan nasional (Kebijakan Pendidikan 2005) pengalaman menunjukkan, bahwa pelaksanaan penyaluran anggaran dan pertanggung jawab penggunaannya, asset masih rentan, dan banyak yang tidak tepat, dan banyak ditemui penyimpangan, yang disebabkan lemahnya pengendalian intern dari pimpinan dan pelayanan minimum pendidikan yang merupakan tolok ukur kinerja pelayanan belum maksimal sehingga menjadikan lembaga Depdinas kurang mendapatkan kepercayaan dari berbagai masyarakat . Untuk dapat mengatasi hal itu, unsur –unsur yang terkait pada Departemen Pendidikan nasional memerlukan alat manajemen sebagai media pengendali, yaitu pengendalian intern dalam mekanisme operasi dalam pelaksanaan pemberian pelayanan pendidikan, sehingga melekat pada setiap aktivitas yang dijalankan oleh setiap pegawai/guru disekolah yang merupakan ujung tombak pelayanan bagi masyarakat, mulai dari pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru serta komite sekolah yang perlu dilibatkan untuk membangun kepercayaan diri-sendiri dan penanaman kompetensi, serta tanggung jawab atas pekerjaan untuk menghasilkan yang terbaik, maka pengendalian intern merupakan suatu yang harus mutlak untuk diwujudkan

Untuk mengujudkan capaian Standar Pelayanan Minimum Pendidikan pada Sekolah SMP/SMA di kota Padang dinilai perlu untuk memperhatikan kualitas administratif control dalam mengaktualisasikan kebijakan-kebijakan pimpinan bagaimana memberikan suatu pelayanan yang terbaik dalam mencapai Pendidikan yang bermutu dan berkualitas.Semuanya itu tentu terkait dengan stakeholders pendidikan tersebut. Konsep pelayanan Pendidikan yang diberikan kepada masyarakat yaitu berdasarkan yaitu berdasarkan Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional Kepmendiknas No.129.a/u/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Standar Pelayanan minimal Pendidikan

Untuk menjamin terimplementasikannya Kepmendiknas tersebut menetapkan bahwa proses pengendalian intern di tingkat satuan pendidikan juga harus sejalan dengan Standar Pelayanan minimum bagi sekolah SMP/SMA. Pada intinya internal control harus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terwadahi dalam Komite Sekolah. .

Dengan mengimplementasi administratif control yang berkualitas diharapkan kinerja pelayanan minimum Pendidikan akan terwujud , sehingga dapat dipercaya oleh stakeholders sebagai lembaga yang mampu memberikan Pendidikan yang bermutu dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas

Perhatian terhadap eksistensi pelayanan pada bidang Pendidikan perlu mendapat prioritas utama dari pemerintah karena hal ini telah menimbulkan permasalahan dalam masyarakat. Harapan bahwa pemerintah mampu menunjukkan pelayanan pada bidang Pendidikan secara optimal sekaligus menepis citra negatif tentang pemerintah selama ini. Pemerintah tidak bisa menghindari situasi untuk memenuhi tuntutan pelayanan pendidikan secara transparan pada tingkat saling pengertian. Semakin baik kualitas pelayanan pendidikan, maka semakin tumbuh dan kuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan sebaliknya, semakin buruk kualitas pelayanan yang diterima masyarakat maka semakin terkubur dan hilang kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hubungan sebab akibat tersebut mulai terlihat pada saat pegawai/guru melaksanakan pekerjaannya yang ditampilkan sebagai sikap dan perilaku dalam bekerja yang merupakan budaya kerja pegawai/guru tersebut.

Pemahaman terhadap Standar Pelayanan Minimum Pendidikan merupakan salah satu unsur yang mampu membantu pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti

“Pengaruh Kualitas pengendalian intern terhadap pencapaian standar pelayanan minimum pendidikan pada SMP/ SMA di kota Padang “

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem pengendalian intern terhadap pencapaian standar pelayanan minimum pendidikan pada Sekolah menengah umum SMP/ SMA di kota Padang, melalui koesioner yang dibagikan kepada kepala-kepala sekolah menengah umum dan Kepala Tata Usaha SMP / SMA di kota Padang dapat disimpulkan bahwa hasil hipotesis atau pengujian adalah menolak H_0 , yang artinya kualitas sistem pengendalian intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian standar pelayanan minimum pendidikan pada Sekolah menengah umum SMP/ SMA di kota Padang.

Kualitas pengendalian intern pada sekolah SMP/SMA di kota Padang sangat baik dengan rata-rata pencapaian 81,96 % untuk pencapaian Standar pelayanan minimum tersebut.

Kinerja Sekolah akan meningkat dengan adanya sistem pengendalian intern, untuk ketercapaian suatu Standar Pelayanan minimum Pendidikan yang dapat mengakses seluruh lapisan masyarakat untuk menikmati Pendidikan tersebut

Hasil penelitian dapat dilihat dari masing-masing sub variabel bahwa :

- a. Praktek yang sehat dalam pelayanan Pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap standar penyelenggaraan Pendidikan untuk usia sekolah siswa SMP/SMA di kota Padang

- b. Praktek yang sehat dalam pelayanan Pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap standar proses pembelajaran untuk siswa putus sekolah
- c. Penempatan guru/pegawai sesuai dengan komptensinya memiliki pengaruh positif terhadap standar kualitas guru tersebut
- d. Standar Pelayanan Minimum Pendidikan dilaksanakan untuk pemberian suatu standar pelayanan minimal yang merupakan tolok ukur suatu pelayanan yang dapat diakses dan dinikmati oleh masyarakat dalam bidang Pendidikan terutama untuk mendapatkan Pendidikan yang berkualitas,maka perlu pengendalian intern
- e Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis ternyata bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara kualitas pengendalian administratif terhadap standar Pelayanan Minimum pada bidang pendidikan,

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Wahyu Agung 2010. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka

Departemen Pendidikan Nasional 2007, **Panduan Pelaksanaan pembinaan Sekolah SMP/SMA**, Direktorat Jenderal Menejemen Pendidikan Dasar Menengah

Hartadi, Bambang. 1990. *Sistem Pengendalian Intern dalam Hubungannya dengan Manajemen dan Audit*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.

Hadi, Sutrisno. 1990. *Analisis Regresi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal Ekonomi dan Manajemen. Volume 1 No.1. April 2003. Jurusan Ekonomi

FHartadi, Bambang. 1990. *Sistem Pengendalian Intern dalam Hubungannya dengan Manajemen dan Audit*. Penerbit BPFE.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional N0.129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Kebijakan Depdiknas Tahun 2007 tentang Pedoman Mutu Sekolah SMP/SMA pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Mulyadi. 1997. *Sistem Akuntansi*.: Penerbit STIE YKPN.

Umaedi. (1999). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Sebuah Pendekatan Baru Dalam Pengelolaan Sekolah Untuk Peningkatan Mutu*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah, Depdiknas.

Yusuf, Al Haryono. 2001. *Auditing (Pengauditan)*. Yogyakarta: Penerbit STIE YKPN.

Mardiasmo 2006, **Perwujudan transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance**
Jurnal Akuntansi vol 2, No.1, Mei : hal 1-2

Mulyadi. 2002. *Auditing*. **Jakarta**: Penerbit Salemba Empat.

Tunggal, Wijaya Amin. 1995. *Struktur Pengendalian Intern*. Jakarta: Rineka Cipta

Undang-undang N0.20 Tahun 2003, **Tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Undang-undang No.22 tahun 2005 **tentang Pemerintahan Daerah**

Peraturan Pemerintah No,25 tahun 2000,**Tentang Standar Pelayanan Minimum bidang wajib yang dilaksanakan daerah Kab/Kota termasuk Pendidikan**

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, **tentang Standar Nasional Pendidikan**

Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2005 **tentang Pedoman penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimum**

Peraturan Pemerintah N0.60 tahun 2008 **tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah**

Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005 **tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Peraturan Pemerintah No,25 tahun 2000,**Tentang Standar Pelayanan Minimum bidang wajib yang dilaksanakan daerah Kab/Kota termasuk Pendidikan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2008 **tentang Kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Program Pasca Sarjana Universitas Andalas, 2007, Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Thesis,

Yunus Hadori 2000, **Paradigma Baru Akuntansi Sektor Publik,** Makalah,kongres Nasional Akuntan Indonesia IV Jakarta